

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang menjadi isu sangat penting pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur. Dalam mewujudkan suatu sistem tata pemerintahan yang baik, perlu adanya perubahan dibidang Akuntansi pada Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur karena melalui proses akuntansi dapat menghasilkan informasi keuangan untuk berbagai pihak disuatu instansi pemerintahan. Perubahan dibidang akuntansi harus didasari dengan suatu dasar yang kuat yaitu dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Standar Akuntansi Pemerintah merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Pada era pemerintahan saat ini banyak terjadi pembaharuan Peraturan Pemerintah yang sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Otonomi Daerah untuk menumbuhkan kesadaran Pemerintah Daerah secara optimal. Hal tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Daerah memberikan kewenangan untuk menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak kewenangan, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus keperluan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan Keuangan Daerah di Indonesia mengalami perkembangan sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Sejak Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal diterapkan di Indonesia pasca diterbitkannya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah serta beberapa Peraturan Perundang-undangan telah diterbitkan terkait dengan Pengelolaan Keuangan Pemerintah, terutama dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Setelah kedua Undang-Undang Otonomi Daerah tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Regulasi mengenai akuntansi semakin banyak diterbitkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Lembaga lain, seperti Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) yang menyusun Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dalam ruang lingkup Pemerintah Pusat, Pelaporan Keuangan dilakukan oleh Menteri Keuangan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Menteri Keuangan menerima Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Layanan Umum pada Kementrian/Lembaga Negara, yang kemudian dikonsolidasi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemerintah sebelumnya telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut masih menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Pada Sektor Korporasi telah berkembang penggunaan akuntansi berbasis akrual yang menggantikan akuntansi kas. Demikian pada sektor publik juga telah terjadi pergeseran penggunaan akuntansi akrual untuk menggantikan akuntansi kas, namun belum sepenuhnya dapat diimplementasikan. Basis akrual pada pemerintahan disebut sebagai akrual modifikasian (Modified Accrual). Perbedaan dengan akrual penuh diterapkan pada korporasi (Proprietary Fund) dengan pemerintahan yaitu dalam hal biaya.

Pada sektor korporasi biaya (Expense) adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Pada sektor pemerintahan pengeluaran kas mengkonsumsi suatu sumber daya yang disebut sebagai Expenditure serta difokuskan pada General Fund. Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan

atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi. Penggunaan sistem berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.



Gambar 1.1 Perkembangan Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual
Sumber : Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia

(<https://djpb.kemenkeu.go.id/portal/id/component/content/article/151-transformasi-kelembagaan/quick-win-tk/1609-akuntansi-pemerintahan.html?Itemid=776>, diakses pada hari Senin 22 Mei 2023)

Di Indonesia gerakan akuntansi menuju berbasis akrual dimulai sejak gerakan reformasi tahun 1998 dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. (<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>, diakses pada hari Senin, 22 Mei 2023). Proses implementasi tersebut tidak lepas dari permasalahan dan kendala terutama berkaitan dengan berkurangnya sumber daya manusia akuntansi yang terampil dan peraturan tingkat pusat yang tidak selaras dengan peraturan di daerah.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Perbendaharaan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK), Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan menghadapi tantangan terkait kualitas data dan ketepatan waktu penyampaian data pemerintah daerah secara berkala. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, terdapat beragam jenis sistem informasi akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Daerah di Indonesia sebagaimana diungkap pada buku Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia dari Masa ke Masa (2018). Sebesar 68% pemerintah daerah menggunakan Sistem Manajemen Daerah (SIMDA), 17% pemerintah daerah menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD), 5% pemerintah daerah menggunakan Sistem Informasi Anggaran dan Keuangan Daerah (SIMAKDA), 2% pemerintah menggunakan E-Finance, 1% pemerintah daerah menggunakan SIMRAL, dan 7% pemerintah daerah menggunakan sistem lainnya. Beragamnya sistem yang digunakan oleh pemerintah daerah berdampak

pada beragamnya cakupan dan keandalan data pemerintah daerah.

(<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/lubuksikaping/id/data-publikasi/artikel/3022-permasalahan-penyusunan-laporan-keuangan-pemerintah-konsolidasian-lkpk-pada-kanwil-djpb.html>, diakses pada hari Senin, 22 Mei 2023).

Beberapa Negara yang menerapkan standar akuntansi berbasis akrual memiliki kendala yang dihadapi pada tahap awal penerapan standar akuntansi berbasis akrual. Negara Malaysia misalnya, seperti di banyak Negara berkembang terdapat kendala berupa kurangnya tenaga akuntan yang profesional dan berkualitas. Pemerintah Malaysia belum memberikan insentif bagi staf akuntansinya. Insentif meliputi biaya tahunan dan beasiswa bagi akuntan pemerintah untuk biaya kursus yang mengarah pada keahlian akuntansi profesional (Saleh and Pendlebury, 2006). Berbeda dengan Negara Malaysia, di Negara Estonia telah ada kualifikasi pelatihan untuk para akuntan. Selain itu staf dari kementerian, auditor, pemerintah, dan anggota parlemen membutuhkan pelatihan di bidang akuntansi keuangan (Tikk, 2010). Pada pulau Fiji, memiliki banyak ketergantungan pada konsultan internasional sehingga menyebabkan bertambahnya biaya. Rendahnya keterampilan dasar akuntan publik juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual di Fiji (Geoffrey Tickell, 2010).

(<https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/download/11172/10706>, diakses pada hari Senin 22 Mei 2023).

Salah satu contoh penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah Provinsi Jawa Tengah yaitu Kabupaten Magelang. Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual di Kabupaten Magelang mengalami tantangan. Proses Penerapan

Sistem Akuntansi Berbasis Akrua akan optimal jika ada dukungan dari Sumber Daya Manusia yang meliputi pembuatan dan penggunaan informasi keuangan, sarana dan prasarana serta sistem informasi yang ada di Pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Magelang menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada. Terlebih dengan adanya pengembangan sistem akuntansi pada pengembangan sumber daya manusia dalam strategi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual secara bertahap yang menyebabkan perlunya penyesuaian kembali baik. Mencermati pengalaman yang lalu, salah satu penyebab kelemahan penyusunan Laporan Keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Magelang adalah lemahnya komitmen pimpinan satuan kerja ((Erawati & Kurniawan, 2018).

Selain di Provinsi Jawa Tengah terdapat juga di Provinsi Sulawesi Utara yaitu di Kota Bitung. Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua di Kota Bitung mengalami tantangan. Proses penerapan sistem akuntansi berbasis akrual memiliki kendala untuk kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia dalam pelaksana secara kuantitas masih belum cukup di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kesiapan perangkat pendukung yang belum teruji. Diperlukan adanya peningkatan kualitas dan jumlah Sumber Daya Manusia dengan berlatar belakang pendidikan akuntansi yang sesuai dan pengadaan sosialisasi serta bimbingan teknik sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang andal dan transparan. (Langelo, F., D. P. E. Saerang, dan S. W. Alexander, 2015).

Menurut penelitian Mekta (2016) menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrua dipengaruhi oleh Komitmen Organisasi. Komitmen

organisasi merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas pegawai pada organisasi dan proses berkelanjutan terhadap anggota organisasi untuk dapat mengekspresikan perhatiannya terhadap organisasi. Komitmen organisasi dapat tumbuh dari ikatan emosional pada suatu instansi yang meliputi dukungan moral, nilai-nilai dalam instansi pemerintahan serta kemauan dalam diri untuk mengabdikan pada suatu instansi pemerintahan. Komitmen organisasi mencakup kebanggaan anggota, kesetiaan anggota, dan kemauan anggota pada organisasi. Menurut penelitian Sinaga (2019) komitmen organisasi merupakan keterkaitan pegawai untuk tetap mempertahankan keanggotaan organisasi/entitas pegawai tersebut dalam bekerja yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Brendhi (2018) dalam Sinaga (2019) komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2018) komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Menurut penelitian Hasibuan (2016) menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dipengaruhi oleh Sumber Daya Manusia. Sumber daya manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien untuk membantu terwujudnya tujuan instansi pemerintah, karyawan, dan masyarakat. Sumber daya manusia seperti aparatur sipil atau pegawai pemerintah ialah salah satu aspek yang harus dibenahi, banyak hal yang terjadi dalam pemerintahan baik pusat ataupun daerah, salah satunya kinerja aparatur yang bekerja dengan tidak akuntabel. Pemerintah yang baik dijalankan dengan memantau kinerja dan integritas pegawai, pemantauan tersebut diperlukan

agar tugas yang diberikan dapat dikerjakan dengan baik dan bekerja semaksimal mungkin. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2017) sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2018) komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Menurut penelitian Warsita (2018: 135) menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dipengaruhi oleh Pemanfaatan Teknologi Informasi. Pemanfaatan Teknologi Informasi adalah sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem dan metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data secara bermakna. (<https://efaidnbmnnnibpcajpcgclefindmkaj/http://repositori.unsil.ac.id/6408/6/7.%20BAB%202.pdf>, diakses pada hari Selasa 23 Mei 2023). Salah satu faktor penting dalam pemanfaatan teknologi informasi ialah tantangan pada pengimplementasian akuntansi berbasis akrual diperlukan sistem akuntansi dan informasi teknologi (IT) bases system. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki proses dalam penyusunan laporan keuangan yang dibutuhkan suatu teknologi informasi berbentuk sistem untuk dapat mengatur proses pengklasifikasian, pengukuran serta pengungkapan semua transaksi yang disebut sistem akuntansi. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Supra (2016) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Aulia dan

Ardiyanti (2019) pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Teori dasar (*grand theory*) yang digunakan adalah teori *New Public Management* (NPM). Teori ini dikemukakan oleh Christopher Hood. Christopher Hood mendefinisikan bahwa adanya penekanan pada perubahan perilaku pemerintah menjadi lebih efektif dan efisien yaitu dengan mengurangi peran pemerintah, membuka peran swasta dan pemerintah dengan lebih berfokus pada kepentingan publik yang lebih luas. Teori new publik management menyatakan bahwa adanya inovasi manajemen pelayanan berbasis kepentingan masyarakat yang memiliki satu opsi perubahan untuk dapat digunakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara dalam mendukung program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan seiring dengan meningkatnya peran dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai manajer aset. ([https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11075/Penerapan-Konsep-Public-Private-Partnership-PPP-Dan-Konsep-New-Public-Management-NPM-Dalam-Meningkatkan-Pemanfaatan-Aset-Negara.html#:~:text=Konsep%20New%20Public%20Management%20\(NPM\)%20yang%20merupakan%20inovasi%20manajemen%20pelayanan,fungsi%20DJKN%20sebagai%20manajer%20aset](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/11075/Penerapan-Konsep-Public-Private-Partnership-PPP-Dan-Konsep-New-Public-Management-NPM-Dalam-Meningkatkan-Pemanfaatan-Aset-Negara.html#:~:text=Konsep%20New%20Public%20Management%20(NPM)%20yang%20merupakan%20inovasi%20manajemen%20pelayanan,fungsi%20DJKN%20sebagai%20manajer%20aset), diakses pada hari Selasa 23 Mei 2023). Program transformasi kelembagaan yang berawal dari tahun 2011 tersebut merupakan kelanjutan dari program reformasi birokrasi. (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-rsk/baca-berita/6746/Sekretaris-DJKN-Transformasi-Kelembagaan-adalah-Kebutuhan-yang-Penting.html>, diakses pada hari Selasa 23 Mei 2023).

Alasan dilakukannya praktik new publik management pada teori ekonomi yakni sebagai adopsi sistem akuntansi berbasis akrual pada organisasi sektor publik. Dari perspektif teori ekonomi, dikatakan bahwa akuntabilitas dan kinerja organisasi sektor public dapat ditingkatkan dengan mentransformasikan proses manajemen, evaluasi, dan pendanaan organisasi sektor publik ke dalam praktik manajemen sektor swasta (Harun dan Kamase) dalam (Herwiyanti,dkk.2017).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, masih terdapat inkonsistensi hasil pada penelitian – penelitian sebelumnya untuk bisa mendorong penulis dalam menguji lebih lanjut mengenai *Pengaruh Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual*. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengambil judul **“Pengaruh Komitmen Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Penerapan Sistem Akuntansi Berbasis Akrual”**.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi berbasis akrual?
2. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi berbasis akrual?
3. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap penerapan sistem akuntansi berbasis akrual?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1 Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.
- 2 Untuk mengetahui pengaruh sumber daya manusia terhadap penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.
- 3 Untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai komitmen organisasi, sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap penerapan sistem akuntansi berbasis akrual, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan.

b. Manfaat Praktis

Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai faktor yang perlu dipertimbangkan guna meningkatkan bahan evaluasi mengenai komitmen organisasi dalam memberikan motivasi pekerjaan, sumber daya manusia yang dapat merekrut dan melatih dalam mengembangkan deskripsi pekerjaan yang lebih relevan, serta pemanfaatan teknologi informasi yang efektif dan efisien untuk menaikkan kualitas pelayanan pada penerapan sistem

akuntansi berbasis akrual.

c. Manfaat Kebijakan

Penelitian diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi instansi pemerintah dalam hal pembuatan kebijakan yang relevan dengan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual yang terjadi.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam melakukan penulisan proposal, secara garis besar dapat diuraikan secara singkat terdiri dari 3 bab yang saling berhubungan. Adapun uraian sistematika penulisan yang digunakan dalam proposal penelitian antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan dan fenomena yang terjadi sehingga menjadikan alasan dalam melakukan penelitian. Bab ini memiliki beberapa sub bab yakni latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan sistematika penulisan dalam penelitian proposal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian saat ini, telaah teori yang menjadi latar belakang penelitian, dan terdiri dari beberapa sub bab yakni hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai rancangan penelitian, identifikasi

variabel, definisi operasional dan pengukurannya, instrumen penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBJEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum pada subjek penelitian, hasil analisis data, dan pembahasan dari hasil analisis data yang telah dilakukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, serta saran yang telah dijelaskan pada hasil penelitian yang diharapkan.